

***THE EFFECT OF UNDERSTANDING GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARDS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS***

**PENGARUH PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

Fikri Ary Nugraha¹, Erry Andhaniwati²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
fikriary95@gmail.com¹, errya.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The government as an organization engaged in public services in its management must also carry out transparency and public accountability. Financial reports are a medium for an entity, in this case the government, to account for its financial performance to the public. This study uses a quantitative approach. The number of samples in this study amounted to 53 people who worked at BPKAD Sidoarjo Regency. The type of data used in this study is primary data in the form of a questionnaire filled out by respondents. The analysis technique used is Partial Least Square (PLS). The results showed that understanding government accounting standards affects the quality of financial statements.

Keywords: Government Accounting Standards, Financial Statements, Government.

ABSTRAK

Pemerintah yang sebagai organisasi yang bergerak pada pelayanan publik dalam pengelolaannya juga harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan merupakan media bagi suatu entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya terhadap publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini berjumlah 53 orang yang bekerja pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diisi oleh responden. Teknik analisis yang digunakan merupakan *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan, Pemerintah.

PENDAHULUAN

Kemajuan area publik di Indonesia menghadapi keunikan berupa meluasnya permintaan dari masyarakat umum terkait tanggung jawab dan kejelasan pendirian area publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai organisasi yang fokus pada pelayanan publik, pemerintah diharapkan untuk menerapkan praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi, baik yang berhasil maupun yang gagal mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Interaksi tanggung jawab ini dilakukan sesekali sebagai bentuk tanggung jawab (Suryani dan Ismail, 2018). Keterbukaan pada dasarnya

adalah aturan yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan data tentang organisasi pemerintah. Hal ini mencakup informasi terkait kebijakan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan hasil yang telah dicapai (Sawir, 2017).

Laporan Keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu. Fungsi utama laporan keuangan adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai aspek keuangan suatu perusahaan kepada berbagai pihak terkait, seperti pemegang saham, kreditor, analis keuangan, dan pihak berkepentingan lainnya.

“Pemerintah (SAP) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip akuntansi dan pedoman pedoman dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan. Berpedoman dengan SAP dapat memudahkan aparaturnya bagian keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”

Pentingnya memahami Prinsip-prinsip Pembukuan Pemerintah dalam substansi administrasi merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas.

Kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia permasalahan-permasalahan terkait kualitas laporan keuangan masih sering kita jumpai, hal ini diakibatkan karena pemerintah kurang serius dalam membenahi permasalahan tersebut sehingga berakibat pada kurang berkualitaskannya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Di Kabupaten Sidoarjo, terdapat sebuah contoh penilaian terhadap ringkasan keuangan pemerintah daerah tahun 2016 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK menunjukkan bahwa sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah sebenarnya tidak memenuhi pedoman yang ditetapkan oleh pedoman yang relevan.

“Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 mengindikasikan temuan signifikan. Dari pemeriksaan terhadap 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 375 LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 139 LKPD, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 23 LKPD. Evaluasi BPK pada IHPS I Tahun 2017 menunjukkan

bahwa dari 6.053 kasus permasalahan yang diidentifikasi, 36% melibatkan kelemahan akuntansi dan pelaporan, 44% terkait kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 20% terfokus pada 5 kelemahan struktur pengendalian internal”

Berdasarkan fenomena, penelitian ini berencana untuk menganalisis dampak dari pemahaman norma-norma pembukuan pemerintah terhadap sifat laporan keuangan dan sumber daya teritorial dalam Peraturan Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan objek yang mencakup pemahaman prinsip-prinsip pembukuan pemerintah, kemampuan aset manusia, inovasi data, dan sifat laporan keuangan. Subjek penelitian ini adalah perwakilan dari segmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo. Jumlah sampel dalam tinjauan ini adalah 53 perwakilan segmen SKPD di BPKAD Kabupaten Sidoarjo.

Informasi yang digunakan sangat penting, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sampel. Investigasi informasi dan pengujian spekulasi diselesaikan dengan menggunakan pemrograman SmartPLS 3.0 untuk menilai hubungan antar faktor.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji *Outer Model*

Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. *Outer Loading*

	<u>Pemahaman Standar Akuntansi</u>	<u>Kualitas Laporan Keuangan</u>
X1.1	0.906	
X1.2	0.832	
X1.3	0.784	
X1.4	0.849	
X1.5	0.855	
X1.6	0.811	
X1.7	0.866	
Y1		0.877
Y2		0.867
Y6		0.850
Y7		0.906

Berdasarkan tabel di atas, dapat diasumsikan bahwa setelah pengujian tahap kedua, hubungan antar faktor telah terbukti sah dan memenuhi nilai legitimasi gabungan, karena semua nilai di atas 0,7. Tahap selanjutnya adalah uji legitimasi diskriminan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Discriminant Validity

	<u>Pemahaman Standar Akuntansi</u>	<u>Kualitas Laporan Keuangan</u>
X1.1	0.906	0.624
X1.2	0.832	0.662
X1.3	0.784	0.359
X1.4	0.849	0.452
X1.5	0.855	0.531
X1.6	0.811	0.610
X1.7	0.866	0.499
Y1	0.614	0.877
Y2	0.640	0.867
Y6	0.413	0.850
Y7	0.562	0.906

Berdasarkan tabel di atas, cenderung beralasan bahwa semua bangunan dalam model memiliki nilai cross loading yang lebih penting dibandingkan dengan nilai antar faktor yang berbeda. Hasil ini dikatakan bahwa penanda telah memenuhi discriminant validity.

Kemudian, metode lain lagi untuk mengevaluasi legitimasi diskriminan adalah dengan melihat nilai akar kuadrat dari perbedaan khas yang dihilangkan (AVE) dari setiap bangunan dengan hubungan di antara bangunan yang berkembang dan bangunan yang berbeda

dalam model. Legitimasi dinyatakan puas dengan asumsi nilai AVE lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2014). Berikut ini adalah tabel konsekuensi dari pengujian nilai AVE:

Tabel 3. Hasil Uji Nilai AVE

VARIABEL	AVE
<u>Pemahaman Standar Akuntansi</u>	0.712
<u>Kualitas Laporan Keuangan</u>	0.766

Melihat tabel di atas, dapat diasumsikan bahwa semua pengembangan memiliki nilai Average Variance Extracted (AVE) di atas 0,50, sesuai dengan aturan yang disarankan. Oleh karena itu, semua faktor dalam penelitian ini cenderung dianggap sah.

Reliabilitas variabel dalam penelitian ini dievaluasi menggunakan teknik composite reliability. Koefisien reliabilitas digunakan sebagai indikator untuk menilai keandalan suatu variabel. Sebuah variabel dianggap reliabel jika memiliki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dari 0,7. Berikut adalah tabel nilai composite reliability:

Tabel 4. Nilai Composite Reliability

VARIABEL	COMPOSITE REABILITY
<u>Pemahaman Standar Akuntansi</u>	0.945
<u>Kualitas Laporan Keuangan</u>	0.929

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan variabel-variabel yang terdapat dalam tinjauan ini dapat dianggap solid dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam tes pemeriksaan tambahan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai reliabilitas komposit yang lebih dari 0,

Uji Inner Model

Pengujian inner model atau model structural dilakukan untuk menilai hubungan antara pengembangan, nilai

kepentingan, dan R-square dari model pemeriksaan. Penilaian model yang mendasari termasuk penggunaan R-square untuk pengembangan yang diandalkan. Hasil akhir dari uji R-square dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil Uji R-Square

VARIABEL	R SQUARE
Kualitas Laporan Keuangan	0.472

Tabel tersebut menunjukkan insentif R-square untuk variabel Kualitas ringkasan Anggaran (Y) sebesar 0,472. Hal ini berarti bahwa sekitar 47,2% variasi dalam Sifat Laporan Anggaran dapat dijelaskan oleh Pemahaman Pedoman Pembukuan Pemerintah (X1), Kemampuan Sumber Daya Manusia (X2), dan Inovasi Data (X3). Sisanya sebesar 52,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam kajian ini.

Tabel tersebut menunjukkan nilai R-square Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,472, yang artinya sekitar 47,2% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2), dan Teknologi Informasi (X3). Sebanyak 52,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang diusulkan selesai melalui pengujian model utama (model ke dalam), memusatkan perhatian pada nilai R-square dan path coefficients. Path coefficients mencerminkan koefisien batas dan makna terukur dari hubungan antara faktor-faktor dalam tinjauan. Makna dari batas-batas yang dinilai memberikan data tentang kekuatan dan arah hubungan variabel.

Kriteria penerimaan hipotesis dalam penelitian ini adalah jika nilai T-Statistic lebih besar dari 1,96 ($>1,96$)

dengan nilai P-Values kurang dari 0,05 ($P < 0,05$), menandakan signifikansi statistik. Sebaliknya, penolakan hipotesis terjadi jika nilai T-Statistic kurang dari 1,96 ($<1,96$) dengan nilai P-Values lebih dari 0,05 ($P > 0,05$), menunjukkan ketidaksignifikan statistik.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Berdasarkan Path Coefficients

Variabel X > Variabel Y	Original Sample (O)	Mean Sample (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistics (O/STDEV)	P-Values
X1 > Y	0.772	0.717	0.270	2.859	0.004

Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah landasan bagi seorang akuntan entitas untuk mengambil keputusan. Kualitas laporan keuangan yang baik tercermin dalam kemudahan pemahaman oleh pengguna. Konsep ini terkait dengan teori keagenan, di mana hubungan keagenan dapat dijelaskan sebagai bawahan sebagai agen dan atasan sebagai prinsipal.

Dalam konteks pelaporan keuangan, entitas pemerintah atau BPKAD bertindak sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna informasi keuangan pemerintah yang berperan sebagai prinsipal. Para prinsipal, dalam hal ini, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bertugas menilai tingkat akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik berdasarkan informasi keuangan yang disampaikan oleh agen.

Sebagai pengguna, semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh pegawai BPKAD, maka informasi tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah dan baik oleh pengguna, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Temuan ini konsisten dengan

hasil penelitian Lestari dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap standar akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran yang dapat diberikan adalah penting bagi pegawai BPKAD untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Ini dapat mencakup partisipasi dalam pelatihan atau workshop terkait akuntansi pemerintahan, mengikuti perkembangan terbaru dalam standar akuntansi, serta memastikan adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik secara berkala untuk memastikan pemahaman yang berkelanjutan. Peningkatan pemahaman ini dapat berdampak positif pada akurasi, kejelasan, dan keterbacaan laporan keuangan yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiawan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis AkruaI, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM Sebagai Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(5), 3475–3500.

Alamsyah, M. R., Rahayu, S., & Muslih, M. (2017). Kompetensi Sumber

Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kineja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok). *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 15(2).

Arifah, D. A. (2012). Praktek Teori Agensi pada Entitas Publik dan Non Publik. *Prestasi*, 9(01).

Eliana, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen STIES)*, 8(1), 22–36.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. *Semarang: Badan Penerbit UNDIP*.

Helena, H. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.

Mutiari, Y. (2018). Pengaruh Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan Pada PT. PP (Persero) Tbk. Proyek Pelabuhan Sibolga. *Skripsi*.
- Nainggolan, L. E., Purba, B., Sudarmanto, E., Nainggolan, P., Hasibuan, A., Simarmata, H. M. P., & Damanik, D. (2021). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 14–28.
- Rafid, R. Z. (2016). *Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bone)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 20(2).
- Sawir, M. (2017). Konsep Akuntabilitas Publik. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 9–18.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Suryani, E., & Ismail, I. (2018). Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Aceh Besar. *Kolegial*, 6(1), 78–87.